



Rasionalitas Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara: Analisis Pertimbangan Biaya dan Manfaat Politik

Ismail Saleh Umarella¹, Syamsir Nur², La Ode Samsul Barani³

^{1,2,3} Program Studi S2 Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo

¹inoqu_umarella@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Biaya Informasi, Biaya Transport, dan Manfaat Kebijakan terhadap Keputusan Memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Tekanan Sosial (Civic Duty) sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 250 responden yang dipilih sebagai sumber data penelitian. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji pengaruh langsung antarvariabel sekaligus peran moderasi Tekanan Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Memilih. Biaya Transport juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan politik responden. Sebaliknya, Manfaat Kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Memilih serta menjadi faktor paling dominan dalam membentuk pilihan politik masyarakat. Sementara itu, Tekanan Sosial tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara Biaya Informasi, Biaya Transport, maupun Manfaat Kebijakan dengan Keputusan Memilih. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat Sulawesi Tenggara cenderung lebih dipengaruhi oleh pertimbangan rasional terhadap manfaat kebijakan yang ditawarkan dibandingkan biaya partisipasi maupun dorongan sosial. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa kandidat dan tim kampanye perlu menekankan kejelasan, relevansi, dan manfaat nyata dari program kebijakan untuk meningkatkan dukungan pemilih. Hasil tersebut juga memperkuat perspektif pilihan rasional dalam menjelaskan perilaku elektoral pada konteks politik lokal di wilayah Sulawesi Tenggara tersebut.

Kata Kunci: Biaya Informasi, Biaya Transportasi, Manfaat Kebijakan, Pemilihan umum, Rational Choice, Tekanan Sosial

1. Latar Belakang

Demokrasi elektoral merupakan mekanisme penting dalam sistem politik modern yang memberikan legitimasi kekuasaan melalui partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (N. H. Putri et al., 2023; Yunita & Maulia, 2024). Dalam perspektif ekonomi politik, keputusan memilih tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi politik, tetapi juga oleh pertimbangan biaya dan manfaat yang dihadapi pemilih (Maskur, 2021). Setiap individu harus mengalokasikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk memperoleh informasi politik, mengakses lokasi pemungutan suara, serta menentukan pilihan yang dianggap paling menguntungkan (Tinambunan et al., 2024).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung merupakan salah satu instrumen penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Sejak implementasi Pilkada langsung pada tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia telah menyelenggarakan multiple siklus pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota (Hayunanda, 2023). Pilkada langsung dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas kepala daerah terhadap konstituen mereka dan memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan kepemimpinan daerah mereka (Aermadepa et al., 2024; Wahyono, 2025).

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada Pilkada serentak 2015, tingkat partisipasi nasional mencapai 74,99%, kemudian menurun pada 2017 menjadi 76,01%, dan meningkat kembali pada 2018 menjadi 73,25%. Pada Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, tingkat partisipasi turun menjadi 69,45% akibat kekhawatiran kesehatan dan pembatasan sosial. Namun, pada Pilkada serentak 2024, tingkat partisipasi meningkat signifikan menjadi 78,32% secara nasional, menunjukkan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap proses elektoral (KPU RI, 2024).

Dalam negara Indonesia, khususnya pada pemilihan kepala daerah, struktur biaya politik cenderung lebih kompleks akibat kondisi geografis, tingkat literasi politik, serta karakteristik sosial yang beragam (Nugraha et al., 2025; Silalahi & Athahirah, 2025). Pilkada langsung yang dilaksanakan sejak era Reformasi menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi lokal, namun tingkat partisipasi pemilih masih menunjukkan variasi yang

cukup besar antar daerah (Mochtar, 2011; Tjenreng, 2020). Variasi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap manfaat politik yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk berpartisipasi dalam proses elektoral.

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang menarik untuk dikaji karena memiliki karakteristik geopolitik dan sosial yang unik. Wilayah yang terdiri atas daratan dan kepulauan menyebabkan biaya mobilisasi politik, akses informasi, serta distribusi logistik pemilu menjadi lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Selain itu, struktur politik yang terfragmentasi, tidak adanya partai dominan, keberadaan berbagai kelompok etnis, serta tingginya jumlah pemilih muda menciptakan dinamika kompetisi politik yang sangat kompetitif. Pilkada 2024 menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dan persaingan antar kandidat yang berlangsung dalam beberapa poros koalisi. Kondisi tersebut menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai laboratorium empiris yang relevan untuk menganalisis perilaku pemilih berdasarkan pendekatan biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) dalam pengambilan keputusan politik.

Struktur politik Sulawesi Tenggara yang tidak didominasi satu partai mendorong terbentuknya berbagai koalisi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Suaib & Suacana, 2016). Persyaratan ambang batas pencalonan mengharuskan partai-partai berkoalisi sehingga melahirkan konfigurasi politik yang fleksibel dan kompetitif. Sejak 2007 hingga 2024, kontestasi gubernur hampir selalu diikuti tiga hingga empat pasangan calon dari koalisi yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan politik tersebar pada banyak partai dan memberikan ruang yang luas bagi elit lokal untuk membangun poros-poros baru. Akibatnya, persaingan politik di Sulawesi Tenggara berlangsung dinamis, kompetitif, dan sulit diprediksi hanya berdasarkan besarnya dukungan koalisi partai pengusung.

Selain faktor geografis dan struktur politik, perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi perilaku pemilih di Sulawesi Tenggara (Maulani et al., 2024; Nurhidayati et al., 2025). Pemanfaatan media sosial dan platform digital memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik, terutama bagi pemilih milenial dan Generasi Z yang memiliki karakteristik lebih kritis, terbuka, dan rasional dalam menentukan pilihan politik (Afifah et al., 2025; Tinambunan et al., 2024). Meskipun demikian, kesenjangan akses informasi antara wilayah perkotaan dan kepulauan masih menjadi tantangan yang dapat memengaruhi kualitas partisipasi politik masyarakat. Dalam situasi kompetisi yang semakin terbuka, pemilih tidak hanya mempertimbangkan identitas etnis, kedekatan emosional, atau patronase politik, tetapi juga menilai rekam jejak kandidat, program pembangunan, serta kemampuan calon dalam menjawab kebutuhan daerah (Bastian, 2022).

Kompetisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, khususnya pada 2018 dan 2024, berlangsung sangat ketat akibat kombinasi faktor politik, sosial, dan geografis. Tidak adanya partai dominan menyebabkan kekuatan politik tersebar sehingga partai-partai harus membentuk koalisi yang melahirkan tiga hingga empat poros persaingan. Selain koalisi, figur lokal yang kuat, seperti mantan kepala daerah dan tokoh adat, memiliki pengaruh besar terhadap perolehan suara. Keragaman etnis juga menjadi faktor penting dalam mobilisasi dukungan politik. Di sisi lain, pemilih Sulawesi Tenggara terdiri atas kombinasi pemilih tradisional dan rasional yang mempertimbangkan identitas, patronase, program, serta rekam jejak kandidat. Karakter wilayah yang terbagi antara daratan dan kepulauan turut meningkatkan biaya kampanye dan kompleksitas mobilisasi politik, sehingga kompetisi menjadi dinamis, terbuka, dan sulit diprediksi (Baan, 2023). Kondisi tersebut diperkuat oleh tingginya partisipasi pemilih, perkembangan media digital, serta meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu pembangunan, infrastruktur, pendidikan, dan lapangan kerja. Akibatnya, kandidat tidak hanya dituntut membangun koalisi politik yang kuat, tetapi juga mampu menawarkan program yang relevan, menjangkau pemilih di berbagai wilayah, serta membangun komunikasi politik yang efektif untuk memperoleh dukungan elektoral yang luas (Sutisna, 2024).

Kompetitivitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh kombinasi struktur politik yang terfragmentasi, tidak adanya partai dominan, keberadaan figur lokal yang kuat, identitas etnis yang beragam, serta karakter pemilih yang memadukan pertimbangan rasional dan tradisional. Kondisi geografis yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan turut meningkatkan kompleksitas mobilisasi politik dan strategi kampanye. Dinamika ini menciptakan kompetisi yang terbuka, ketat, dan sulit diprediksi. Di sisi lain, fragmentasi politik menuntut kemampuan pemerintah terpilih dalam membangun konsensus dan menjaga stabilitas pemerintahan. Tantangan lainnya adalah tingginya biaya politik dan potensi praktik transaksional (Hasibuan et al., 2023).

Oleh karena itu, kualitas demokrasi Sulawesi Tenggara ke depan sangat bergantung pada penguatan kompetisi berbasis program, pengurangan politik uang, serta kemampuan pemimpin daerah mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dengan memperkuat partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan, akuntabilitas kebijakan publik, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan secara berkesinambungan dan efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis biaya dan manfaat yang dipertimbangkan pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta menjelaskan bagaimana faktor geografis, politik, sosial, dan teknologi membentuk rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis paradigma ekonomi politik dengan mengintegrasikan *Rational Choice Theory*, *Public Choice Theory*, dan *Behavioral Economics* (Weruin, 2022). Analisis dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji pengaruh biaya informasi, biaya transportasi, manfaat kebijakan, serta peran moderasi tekanan sosial terhadap keputusan memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (L. M. Putri et al., 2024).

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan dinamika politik yang khas. Lokasi penelitian mencakup tiga klaster wilayah, yaitu Kota Kendari sebagai wilayah perkotaan, Kabupaten Konawe sebagai wilayah pesisir daratan, serta Kabupaten Wakatobi atau Bombana sebagai wilayah kepulauan. Pemilihan lokasi bertujuan merepresentasikan variasi akses informasi dan biaya transportasi memilih. Penelitian berlangsung selama enam bulan, meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian.

Penelitian ini terdiri dari lima variabel dan 50 indikator maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 5 kali jumlah parameter yang di estimasi atau indikator yang digunakan, dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden ($50 \times 5 = 250$) (Haryono & Wardoyo, 2012).

3. Hasil dan Diskusi

Karakteristik Responden

Tabel 1 Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	145	58
	Perempuan	105	42
	Jumlah	250	100
Usia	17 – 25 Tahun	21	8.4
	26-35 Tahun	77	30.8
	36-45 Tahun	92	36.8
	46-55 Tahun	37	14.8
	> 55 Tahun	23	9.2
	Jumlah	250	100
Pendidikan Terakhir	SD/Sederajat	7	2.8
	SMP/Sederajat	5	2
	SMA/Sederajat	40	16
	Diploma	22	8.8
	Sarjana	153	61.2
	Pascasarjana	23	9.2
	Jumlah	250	100
Pekerjaan	ASN	156	62.4
	Wiraswasta	67	26.8
	Petani/Nelayan	8	3.2
	Pelajar/Mahasiswa	8	3.2
	Tidak Bekerja	11	4.4
	Jumlah	250	100
Penghasilan/Bulan	> Rp 1.000.000	18	7.2
	1.000.000 – 3.000.000	44	17.6
	Rp 3.000.000-5.000.000	104	41.6
	Rp 5.000.000 – 10.000.000	79	31.6
	< Rp 10.000.000	5	2
	Jumlah	250	100
Kabupaten/Kota Domisili	Kota Kendari	59	23.6
	Kota Bau Bau	15	6
	Konawe	11	4.4
	Kolaka	18	7.2
	Wakatobi	15	6
	Muna	15	6
	Muna Barat	4	1.6
	Buton Tengah	16	6.4
	Konawe Kepulauan	14	5.6
	Bombana	12	4.8
	Konawe Selatan	13	5.2

Karakteristik Responden		Frekuensi	Persentase (%)
	Konawe Utara	13	5.2
	Kolaka Utara	4	1.6
	Buton	3	1.2
	Buton Utara	26	10.4
	Buton Selatan	7	2.8
	Kolaka Timur	5	2
	Jumlah	250	100
Kategori Wilayah	Perkotaan	174	69.6
	Pesisir	34	13.6
	Kepulauan	42	16.8
	Jumlah	250	100
Jarak Rumah Ke TPS	< 1 Km	181	72.4
	1 – 3 Km	58	23.2
	3 – 5 K	1	0.4
	> 5 Km	10	4
	Jumlah	250	100
Akses Transportasi Ke TPS	Jalan kaki	87	34.8
	Sepeda Motor	146	58.4
	Mobil Pribadi	13	5.2
	Angkutan Umum	3	1.2
	Perahu/Kapal	1	0.4
	Lainnya	0	0
	Jumlah	250	100
Apakah Anda menggunakan hak pilih pada Pilgub Sulawesi Tenggara terakhir?	Ya	250	100
	Tidak	0	0
	Jumlah	250	100

Sumber: Data diolah (2026)

Dari tabel 1 diatas menggambarkan bahwa Karakteristik 250 responden menunjukkan keragaman demografis, sosial, ekonomi, dan geografis yang cukup luas. Responden didominasi laki-laki (58%), berusia produktif 26–45 tahun (67,6%), serta berpendidikan sarjana (61,2%). Dari sisi pekerjaan, mayoritas merupakan ASN (62,4%), diikuti wiraswasta (26,8%), dengan tingkat penghasilan yang sebagian besar berada pada kategori menengah Rp3–5 juta per bulan (41,6%). Sebaran responden mencakup berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, dengan Kota Kendari sebagai wilayah asal terbanyak (23,6%). Berdasarkan kategori wilayah, mayoritas berdomisili di kawasan perkotaan (69,6%). Akses menuju TPS tergolong mudah karena 72,4% responden tinggal kurang dari 1 km dari TPS. Seluruh responden (100%) menggunakan hak pilih pada Pilgub Sulawesi Tenggara terakhir. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pendidikan, pengalaman sosial, dan kondisi ekonomi yang relatif memadai untuk memahami informasi politik serta mengevaluasi program kandidat. Dominasi kelompok usia dewasa produktif dan ASN juga mengindikasikan adanya pengalaman yang cukup dalam proses politik dan pemerintahan.

Selain itu, penyebaran responden dari berbagai wilayah memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap perilaku pemilih di Sulawesi Tenggara. Kondisi ini memperkuat kualitas data penelitian karena mencerminkan variasi karakteristik pemilih yang beragam, sehingga hasil analisis dapat digunakan untuk menjelaskan kecenderungan perilaku memilih secara lebih komprehensif.

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 namun untuk loading 0.50 sampai dengan 0.60 masih dapat diterima bila output korelasi antara indikator dengan konstruksya baik.

Tabel 2. *Cross Loading* Indikator dengan Variabel

Indikator	Biaya Informasi	Biaya Transport	Keputusan Memilih	Manfaat Kebijakan	Tekanan Sosial	Ket
BI1	0.875					Valid
BI2	0.861					Valid
BI3	0.827					Valid
BI4	0.923					Valid
BI5	0.889					Valid
BI6	0.865					Valid
BI7	0.876					Valid
BI8	0.901					Valid

Indikator	Biaya Informasi	Biaya Transport	Keputusan Memilih	Manfaat Kebijakan	Tekanan Sosial	Ket
BI9	0.894					Valid
BI10	0.866					Valid
BT1		0.875				Valid
BT2		0.885				Valid
BT3		0.859				Valid
BT4		0.884				Valid
BT5		0.907				Valid
BT6		0.896				Valid
BT7		0.902				Valid
BT8		0.878				Valid
BT9		0.878				Valid
BT10		0.891				Valid
KM1			0.928			Valid
KM2			0.906			Valid
KM3			0.890			Valid
KM4			0.922			Valid
KM5			0.874			Valid
KM6			0.914			Valid
KM7			0.907			Valid
KM8			0.886			Valid
KM9			0.928			Valid
KM10			0.877			Valid
MK1				0.895		Valid
MK2				0.876		Valid
MK3				0.894		Valid
MK4				0.915		Valid
MK5				0.932		Valid
MK6				0.893		Valid
MK7				0.906		Valid
MK8				0.900		Valid
MK9				0.909		Valid
MK10				0.888		Valid
TS1					0.911	Valid
TS2					0.918	Valid
TS3					0.908	Valid
TS4					0.891	Valid
TS5					0.903	Valid
TS6					0.903	Valid
TS7					0.883	Valid
TS8					0.894	Valid
TS9					0.873	Valid
TS10					0.886	Valid

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 2 maka dapat terlihat bahwa seluruhnya telah memenuhi *convergent validity* karena semua loading factor > 0.6. Dengan demikian, dapat disimpulkan *convergent validity* dari seluruh kelompok konstruk endogen adalah valid.

Discriminant validity dengan menggunakan square root of *average variance extracted* (AVE). Jika nilai *square root of average variance extracted* ($\sqrt{\text{AVE}}$) setiap variabel lebih besar dari nilai AVE dan korelasi antara variabel laten dengan variabel laten lainnya, maka instrumen variabel dikatakan valid diskriminan.

Tabel 3 Nilai AVE, $\sqrt{\text{AVE}}$ dan Korelasi antar Variabel Laten

Variabel Penelitian	AVE	$\sqrt{\text{AVE}}$	Korelasi				
			Biaya Informasi	Biaya Transport	Keputusan Memilih	Manfaat Kebijakan	Tekanan Sosial
Biaya Informasi	0.767	0.875	1.000	0.589	0.423	0.609	0.321
Biaya Transport	0.784	0.885	0.589	1.000	0.492	0.741	0.419
Keputusan Memilih	0.816	0.903	0.423	0.492	1.000	0.703	0.514

Manfaat Kebijakan	0.812	0.901	0.609	0.741	0.703	1.000	0.513
Tekanan Sosial	0.805	0.897	0.321	0.419	0.514	0.513	1.000

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa instrumen yang digunakan dalam pengukuran variabel penelitian ini dikatakan valid secara diskriminan karena nilai *square root of average variance extracted* ($\sqrt{AVE}$) setiap variabel lebih besar dari nilai AVE dan korelasi antara variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya.

Composite reliability menguji nilai reliability antara indikator dari konstruk. Hasil composite reliability dikatakan baik, jika nilainya $\geq 0,70$. Hasil pengujian composite reliability model penelitian ini dapat disajikan pada Tabel 4

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas Model Pengukuran dan Instrumen

Variabel Penelitian	Construct Reliability	Hasil
Biaya Informasi	0.971	Reliabel
Biaya Transport	0.973	Reliabel
Manfaat Kebijakan	0.975	Reliabel
Tekanan Sosial	0.975	Reliabel
Keputusan Memilih	0.976	Reliabel

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil pengujian pada Tabel 5.15. diperoleh nilai *composite reliability* variabel biaya informasi, biaya transport, manfaat kebijakan, tekanan sosial dan Keputusan memilih menunjukkan bahwa ketiga variabel laten yang dianalisis memiliki reliabilitas komposit yang baik karena nilainya lebih besar dari 0,70. Dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria atau layak untuk digunakan dalam pengukuran keseluruhan variabel laten yakni: kualitas layanan, kepuasan dan loyalitas pelanggan karena memiliki kesesuaian dan keandalan yang tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi *convergent* dan *discriminant validity* dari indikator serta *construct reliability* untuk indikator, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator sebagai pengukur variabel laten masing-masing merupakan pengukur yang valid dan reliabel. Dengan demikian selanjutnya dapat diketahui *goodness of fit* model dengan mengevaluasi inner model

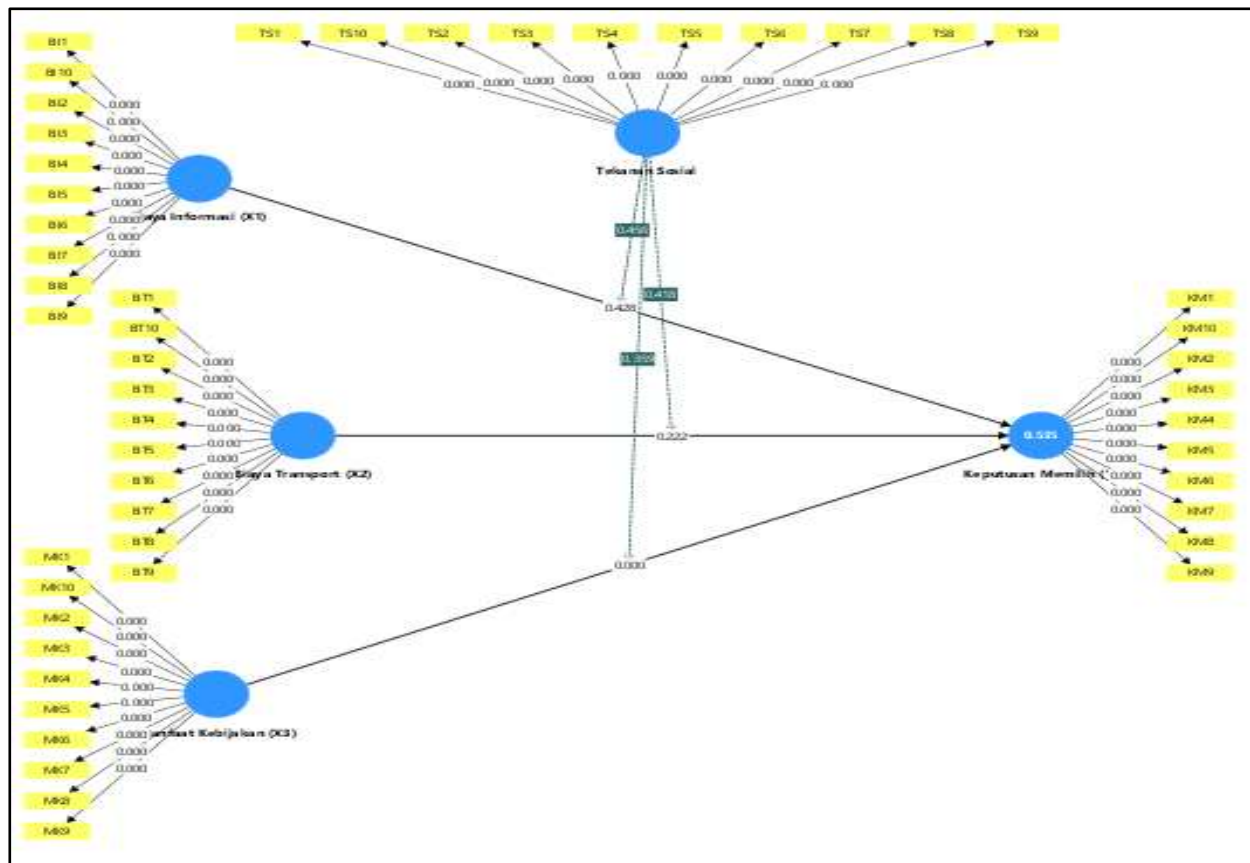
Goodness of fit Model dihitung menggunakan r square. Untuk nilai R Square adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut (Haryono & Wardoyo, 2012) nilai R square sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemah).

Tabel 5 Hasil Pengujian *Goodness of Fit*

Model Struktural	Variabel Endogen	R-Square
1	Keputusan Memilih	0.530
2	Tekanan Sosial	0.267

Sumber: Data diolah (2026)

Nilai predictive relevance (Q^2) sebesar 0,655 menunjukkan model mampu menjelaskan 65,5% variasi keputusan memilih yang dipengaruhi biaya informasi, biaya transportasi, manfaat kebijakan, dan tekanan sosial. Sisanya 34,5% dijelaskan faktor lain. Karena $Q^2 > 0$, model memiliki kemampuan prediktif yang baik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dan koefisien jalur pengaruh secara langsung antara variabel kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Hasil pengujian pengaruh antar variabel dapat diketahui dari nilai koefisien jalur dan titik kritis (t- statistik) yang disajikan pada gambar 1 diagram jalur berikut



Gambar 1 Diagram Jalur

Sumber : Data diolah (2026)

Selanjutnya dilakukan Pengujian hipotesis dan koefisien jalur pada penelitian ini yang dapat diketahui dari nilai koefisien jalur dan titik kritis (t-statistik). Secara lengkap dapat disajikan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Koefisien Jalur dan Pengujian Hipotesis

Pengaruh antara Variabel		Koefisien Jalur (β)				Hasil Pengujian Hipotesis	
		Estimate	SD	t-stat	Sig.t		
Pengaruh Langsung							
H ₁	Biaya Informasi→Keputusan Memilih	0.018	0.101	0.181	0.428	Tidak Sig	Ditolak
H ₂	Biaya Transport→Keputusan Memilih	-0.089	0.116	0.765	0.222	Tidak Sig	Ditolak
H ₃	Manfaat Kebijakan→Keputusan Memilih	0.655	0.114	5.770	0.000	Sig	Diterima
Pengaruh Tidak Langsung							
H ₄	Tekanan Sosial x Biaya Informasi→Keputusan Memilih	-0.009	0.082	0.110	0.456	Tidak Sig	Ditolak
H ₅	Tekanan Sosial x Biaya Transport→Keputusan Memilih	0.022	0.109	0.206	0.418	Tidak Sig	Ditolak
H ₆	Tekanan Sosial x Manfaat Kebijakan→Keputusan Memilih	0.040	0.112	0.362	0.359	Tidak Sig	Ditolak

Sumber : Data diolah (2026)

Hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Pengaruh Biaya Informasi Terhadap Keputusan Memilih

Hasil pengujian penelitian menunjukkan bahwa Biaya Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Memilih pada Pilgub Sulawesi Tenggara. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,018, t-statistics 0,181, dan p-values 0,428, sehingga hipotesis ditolak. Temuan deskriptif memperlihatkan bahwa mayoritas responden tidak mengalami kesulitan memperoleh informasi politik karena tersedianya media sosial, portal berita, dan publikasi digital yang mudah diakses. Kondisi tersebut menyebabkan biaya informasi relatif rendah dan tidak menjadi faktor pembeda dalam keputusan memilih. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilih lebih dipengaruhi oleh kualitas, kredibilitas, dan manfaat informasi dibandingkan biaya untuk memperolehnya. Temuan ini juga mencerminkan konsep *bounded rationality*, di mana pemilih menggunakan informasi yang dianggap cukup untuk menentukan pilihan tanpa harus menguasai seluruh informasi politik yang tersedia (Istianah et al., 2025). Selain itu, karakteristik responden yang seluruhnya merupakan pemilih aktif turut memengaruhi hasil penelitian karena tidak terdapat perbandingan dengan kelompok yang tidak menggunakan hak pilih. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, informasi politik dapat diperoleh secara cepat, murah, dan luas sehingga hambatan pencarian informasi semakin berkurang (Hasfi, 2019). Oleh karena itu, perhatian penyelenggara pemilu, media, dan tim kampanye sebaiknya tidak hanya berfokus pada kuantitas informasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas, transparansi, dan kemudahan verifikasi informasi agar pemilih mampu mengambil keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan pertimbangan yang objektif. Hal ini juga diyakini oleh Arifin & Hadnayani (2024) yang menemukan dan menyimpulkan bahwa regulasi pemilu agar diformat ulang sehingga lebih demokratis, berkeadilan, mampu memenuhi transparansi dan integritas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menguatkan temuan penelitian Arifany et al. (2024) bahwa pemilih semakin mudah memperoleh informasi politik sehingga Biaya Informasi tidak lagi menjadi hambatan utama dalam menentukan pilihan.

2. Pengaruh Biaya Transportasi Terhadap Keputusan Memilih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Transportasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar -0,089, nilai t-statistics 0,765, dan p-values 0,222, sehingga hipotesis kedua ditolak. Meskipun koefisien bernilai negatif sesuai prediksi teori, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Temuan deskriptif menunjukkan mayoritas responden tidak mengalami hambatan transportasi yang berarti. Jarak menuju TPS dinilai dekat, biaya perjalanan tidak membebani, waktu tempuh tidak mengganggu aktivitas, dan kondisi akses menuju TPS relatif baik. Selain itu, responden menilai lokasi TPS strategis dan mudah dijangkau sehingga biaya aktual perjalanan menjadi rendah.

Hasil ini menunjukkan bahwa biaya transportasi belum mencapai tingkat yang dapat memengaruhi keputusan memilih. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifany et al. (2024) yang menemukan bahwa biaya transportasi bukanlah menjadi hambatan bagi masyarakat dalam melakukan pemilihan suara.

Kemudahan akses, ketersediaan sarana transportasi, serta penempatan TPS yang dekat dengan permukiman membuat pemilih tetap menggunakan hak pilihnya. Temuan ini berbeda dengan prediksi teori *rational choice* yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dapat mengurangi partisipasi politik. Namun, dalam konteks penelitian ini, manfaat yang dirasakan pemilih, seperti kepuasan menjalankan hak politik dan harapan terhadap kebijakan kandidat, lebih besar dibandingkan biaya perjalanan yang dikeluarkan. Dengan demikian, biaya transportasi bukan menjadi hambatan utama bagi responden, meskipun tetap perlu diperhatikan pada wilayah terpencil, kepulauan, dan kelompok masyarakat dengan akses terbatas.

3. Pengaruh Manfaat Kebijakan Terhadap Keputusan Memilih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manfaat Kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,655, nilai t-statistics 5,770, dan p-values 0,000, sehingga hipotesis ketiga diterima. Dibandingkan variabel lainnya, Manfaat Kebijakan merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan memilih.

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian tinggi terhadap manfaat kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan, keamanan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta penciptaan lapangan kerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemilih lebih mempertimbangkan manfaat kolektif bagi masyarakat dibandingkan keuntungan pribadi semata. Dengan kata lain, orientasi pemilih cenderung bersifat *sociotropic*, yaitu menilai kandidat berdasarkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan daerah secara umum (Nadzifah, 2020).

Hasil penelitian mendukung *Rational Choice Theory* yang menjelaskan bahwa pemilih akan memilih kandidat yang diperkirakan memberikan manfaat terbesar (Aldrich, 1993; Blais, 2000; Izzah, 2024; Tenri et al., 2025). Selain itu, rekam jejak dan kinerja masa lalu kandidat juga menjadi pertimbangan penting dalam

menilai kemungkinan keberhasilan program yang ditawarkan. Pemilih tidak hanya menilai janji kampanye, tetapi juga kredibilitas dan kemampuan kandidat untuk merealisasikannya (La Ode et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan memilih masyarakat Sulawesi Tenggara lebih banyak didasarkan pada evaluasi terhadap manfaat pembangunan dan pelayanan publik jangka panjang. Hal ini sedikit bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Esiyuningsih et al. (2026) bahwa figur kandidat menjadi pertimbangan penting dalam memilih dan menentukan calon dibandingkan dengan tawaran program jangka panjang pembangunan. Oleh karena itu, kandidat perlu mengedepankan program yang realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat agar memperoleh dukungan politik yang lebih kuat. Penelitian ini juga menegaskan penelitian yang dilakukan oleh Zarwan (2026) yang menyimpulkan bahwa pemilih dari Calon Kandidat (Dozer) tidak berjalan dengan spontanitas namun terbentuk karena adanya kerja-kerja yang dilakukan oleh pasangan kandidat dalam menyampaikan visi misi dan gagasan yang diusung kepada masyarakat.

4. Peran Tekanan Sosial/*Civic Duty* dalam memoderasi pengaruh Biaya Informasi, Biaya Transport, dan Manfaat Kebijakan terhadap Keputusan Memilih
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tekanan Sosial tidak mampu memoderasi pengaruh Biaya Informasi, Biaya Transportasi, maupun Manfaat Kebijakan terhadap Keputusan Memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Hasil bootstrapping menunjukkan seluruh variabel interaksi memiliki nilai t-statistics di bawah 1,96 dan p-values di atas 0,05, sehingga seluruh hipotesis moderasi ditolak. Pada hubungan Biaya Informasi dan Keputusan Memilih, koefisien interaksi sebesar $-0,009$ dengan t-statistics 0,110 dan p-values 0,456. Temuan ini menunjukkan bahwa dorongan keluarga, teman, tokoh masyarakat, maupun kelompok sosial tidak mengubah pengaruh biaya pencarian informasi terhadap keputusan memilih. Kemudahan akses informasi melalui media sosial dan platform digital membuat pemilih lebih mengandalkan penilaian pribadi dibandingkan pengaruh lingkungan sosial (Herwanto & Febrianti, 2025; Setyarahajoe, 2025; Sinamo et al., 2025; Swari et al., 2025). Pada hubungan Biaya Transportasi dan Keputusan Memilih, koefisien interaksi sebesar 0,022 dengan t-statistics 0,206 dan p-values 0,418. Tidak signifikannya moderasi ini dipengaruhi oleh rendahnya hambatan transportasi yang dirasakan responden karena lokasi TPS umumnya mudah dijangkau. Sementara itu, pada hubungan Manfaat Kebijakan dan Keputusan Memilih, koefisien interaksi sebesar 0,040 dengan t-statistics 0,362 dan p-values 0,359. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih tetap mendasarkan keputusan pada manfaat program kandidat, terlepas dari tingkat tekanan sosial yang dirasakan. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keputusan memilih lebih dipengaruhi oleh evaluasi rasional dan pertimbangan individu terhadap manfaat kebijakan daripada tekanan sosial. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jati (2022) bahwa pemilih suara akan melakukan evaluasi rasional daripada faktor tradisional dimana pemilih akan memberikan suara terhadap performan kandidat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas informasi politik, pendidikan pemilih, dan penyajian program kandidat yang jelas lebih penting dibandingkan mobilisasi berbasis tekanan sosial.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Biaya Informasi, Biaya Transport, dan Manfaat Kebijakan terhadap Keputusan Memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menempatkan Tekanan Sosial (*Civic Duty*) sebagai variabel moderasi. Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa Biaya Informasi dan Biaya Transport tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Memilih. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemudahan akses informasi politik melalui berbagai media serta aksesibilitas TPS yang relatif baik menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan pemilih tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politik. Sebaliknya, Manfaat Kebijakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi faktor paling dominan dalam membentuk Keputusan Memilih. Pemilih cenderung memberikan dukungan kepada kandidat yang dinilai mampu menghadirkan manfaat nyata melalui program pembangunan, peningkatan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat Sulawesi Tenggara lebih banyak didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap manfaat kebijakan yang diharapkan dibandingkan pada perhitungan biaya partisipasi politik. Selain itu, Tekanan Sosial (*Civic Duty*) tidak terbukti memoderasi hubungan antara Biaya Informasi, Biaya Transport, maupun Manfaat Kebijakan dengan Keputusan Memilih. Hasil ini mengindikasikan bahwa keputusan memilih lebih dipengaruhi oleh evaluasi individual terhadap program dan kinerja kandidat daripada oleh dorongan sosial atau norma kolektif. Dengan demikian, penelitian menegaskan bahwa rasionalitas pemilih dalam konteks Pilgub Sulawesi Tenggara terutama dibentuk oleh ekspektasi terhadap manfaat kebijakan yang ditawarkan kandidat.

Referensi

1. Aermadepa, A., Apriyanto, A., Mulyeni, Y., Judijanto, L., Lawra, R. D., & Nizwana, Y. (2024). *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
2. Afifah, A. N., Fadli, Y., & Chumaedy, A. (2025). Generasi Z dan Demokrasi Digital: Studi Keterlibatan Politik dalam Pilkada Kota Tangerang 2024. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 16(2), 135–157. <https://doi.org/10.22212/jp.v16i2.5092>
3. Aldrich, J. H. (1993). Rational Choice and Turnout. *American Journal of Political Science*, 37(1), 246. <https://doi.org/10.2307/2111531>
4. Arifany, E. A., Ikhwani, F. P., & Rajasyah, M. A. (2024). Hambatan dan Tantangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu): Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih. *Humani*, 1(1). <https://jurnal.asraindonesia.com/index.php/humani/article/view/3>
5. Arifin, Z., & Hadnayani, E. P. (2024). Urgensi Memformat Ulang Regulasi Pemilu di Indonesia: Mewujudkan Keadilan, Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 609–656. <https://doi.org/10.55292/r3feyf13>
6. Baan, J. C. (2023). *Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018*. Universitas Hasanuddin.
7. Bastian, A. F. (2022). *Strategi Marketing Mix Politik dalam Pemenangan Pilkada - Suatu Pendekatan Praktik dan Akademik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
8. Blais, A. (2000). *To Vote or Not to Vote: The Merits and Limits of Rational Choice Theory*. University of Pittsburgh Press.
9. Esiyuningsih, N. K., Arsalim, A., & Brata, J. T. (2026). Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe. *Journal Of Government Science*, 2(1), 123–133. <https://doi.org/10.54297/jogs.v2i1.1283>
10. Haryono, S., & Wardoyo, P. (2012). *Structural Equation Modeling*. PT Intermedia Personalia Utama.
11. Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik di Era Digital. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 93. <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111>
12. Hasibuan, R. Y., Simangunsong, M., May, B., Tobing, D. U. A. L., Ginting, L. M. B., & Bintang, D. P. (2023). Dinasti Politik dalam Pemilu: Antara Partisipasi Warga Negara dan Politik Transaksional. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 1(3), 8–12. <https://doi.org/10.33151/ijomss.v1i3.94>
13. Hayunanda, N. (2023). *Konflik Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020*. Universitas Lampung.
14. Herwanto, D. P., & Febrianti, D. (2025). Generasi Z di Era Politik Digital: Bagaimana Media Sosial Membentuk Kecemasan dan Antusiasme dalam Pilkada Bogor 2024. *KALBISOCIO Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 12(1), 196–205. <https://doi.org/10.53008/kalbisocio.v12i1.4516>
15. Istianah, R., Devriansyah, A., Apandi, A. P., & Fauziah, A. (2025). Perilaku Pemilih dan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 35–47. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.277>
16. Izzah, N. (2024). *Preferensi Pemilih Muda Memilih pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Makassar 2024 (Studi Kasus pada Pemilih Zulhajar)*. Universitas Hasanuddin.
17. Jati, W. R. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 70–84. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.195>
18. La Ode, R., Muhammad, R. A. L. O., & Abdullah, A. (2025). Persepsi Pemilih Pemula dalam Menentukan Pilihan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024. *Jurnal Sosiologi Miabhar*, 105–135. <https://doi.org/10.55340/jsm.v2i2.1768>
19. Maskur, A. (2021). Perilaku Pemilih dalam Menentukan Keputusan Politik di Indonesia pada Awal Era Reformasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(03), 341–349. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.03.4>
20. Maulani, M., Yunus, A., & Nadir, S. (2024). Perilaku Politik Masyarakat Pulau Rajuni Kecamatan Takabonerate pada Pemilukada Selayar 2020. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 13(2), 361–375. <https://doi.org/10.35724/sjias.v13i2.6237>
21. Mochtar, H. (2011). *Demokrasi dan Politik Lokal di Kota Santri*. Universitas Brawijaya Press.
22. Nadzifah, C. W. W. (2020). *Hubungan Personal Kandidat, Program Kandidat, dan Lingkungan Sosial Pemilih Terhadap Orientasi Memilih Generasi Millenial pada Pemilihan Presiden 2019 di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Airlangga.
23. Nugraha, A., Garvera, R. R., & Sujai, I. (2025). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 90–102. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1278>
24. Nurhidayati, S., Ferdiansyah, A., & Wijaya, D. (2025). Perilaku Pemilih dalam Menentukan Pilihan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 8(2), 416–522. <https://doi.org/10.58406/jrkit.v8i2.2263>
25. Putri, L. M., Maulidya, U. R., Purba, G. V. R., Sulaiman, F. J., & Mardianto, M. F. F. (2024). Preferensi Generasi Z Surabaya dalam Keputusan Pemilihan Umum 2024 Berdasarkan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares. *Zeta - Math Journal*, 9(2), 60–72. <https://doi.org/10.31102/zeta.2024.9.2.60-72>
26. Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66–80. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1006>
27. Setyarahajoe, R. (2025). *Politik Digital: Transformasi Komunikasi Politik di Era Media Sosial*. Jakad Media Publishing.
28. Silalahi, G. Q. D., & Athahirah, A. U. (2025). *Literasi Politik Masyarakat Transisi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
29. Sinamo, D. R., Gultom, G. M., Sinurat, R., & Lumbantobing, R. (2025). Media dan Perubahan Sosial Studi Kasus: Tentang Penggunaan Media Sosial dalam Kampanye Politik dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 223–230. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/260>
30. Suaib, E., & Suacana, I. W. G. (2016). Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(1), 39–55. <https://media.neliti.com/media/publications/102885-ID-institusionalisasi-partai-politik-studi-k.pdf>
31. Sutisna, I. N. (2024). *Digital Marketing for Politics: Pemasaran Politik Era Digital*. Penerbit Adab.
32. Swari, N. K. T. N., Pramana, G. I., & Noak, P. A. (2025). Dampak Penggunaan Media Sosial dan Kampanye Digital Terhadap Perilaku Memilih Pemula (Gen Z) dalam Pilkada Bali. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(5), 61–70. <https://doi.org/10.9963/fqbqqa30>
33. Tenri, A., Mobo, N. S., & Abidin, Z. (2025). Peran Partai Politik dan Kandidat dalam Membentuk Pilihan Rasional pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 12(2), 601–606. <https://doi.org/10.37676/professional.v12i2.9075>
34. Tinambunan, C. P., Syailendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Analisis Perilaku Generasi Z dalam Menentukan Pilihan Politik. *Sosio E-Kons*, 16(3), 325. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i3.27069>

35. Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.
36. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
37. Wahyono, E. (2025). Perspektif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 224–241. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/2306>
38. Weruin, U. U. (2022). Kritik Behavioral Economics Terhadap Rasionalitas Ekonomi. *Prosiding SENAPENMAS*, 2(1), 884–892. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSENAPENMAS/article/view/21923>
39. Yunita, P., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 137–142. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>
40. Zarwan, R. R. (2026). *Dukungan Politik Relawan Dozer Terhadap Pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024*. Universitas Hasanuddin.